

**MANAJEMEN KONFLIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
SENGKETA MATA RUMAH PARENTAH ANTARA
MATA RUMAH DAN BUPATI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 dalam Ilmu Komunikasi



Disusun oleh:

LIE, TAMISHA ZARIKA
21.M1.0029

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2025

**MANAJEMEN KONFLIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
SENGKETA MATA RUMAH PARENTAH ANTARA
MATA RUMAH DAN BUPATI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 dalam Ilmu Komunikasi



Disusun oleh:
LIE, TAMISHA ZARIKA
21.M1.0029

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

CONFLICT MANAGEMENT OF LOCAL GOVERNMENT IN THE DISPUTE OVER MATA RUMAH PARENTAH BETWEEN MATA RUMAH AND THE REGENT IN CENTRAL MALUKU REGENCY

Lie, Tamisha Zarika

Soegijapranata Catholic University
Semarang

ABSTRACT

The selection of mata rumah parentah often triggers conflicts within indigenous communities. This study aims to analyze the conflict management strategies employed by the local government in resolving disputes over mata rumah parentah between mata rumah and the regent in three villages: Negeri Layeni, Negeri Tulehu, and Negeri Titawaai. This research employs two main concepts: mata rumah parentah and conflict management. Additionally, the study utilizes face negotiation theory to examine how the involved parties strive to maintain their face during the conflict. This research adopts a qualitative approach with a descriptive data presentation. The methodology used is a case study, with data collected through document analysis including Supreme Court rulings and regional regulations as well as semi-structured interviews with relevant stakeholders, such as the Head of the National and Political Unity Agency of Central Maluku Regency, the Head of the Government Division of Central Maluku Regency, local rulers (raja), and village secretaries. The findings indicate that, in conflict resolution, the local government predominantly employs competing and avoiding conflict management styles. Customary cases are referred back to the villages, limiting the role of the local government to that of a mediator and facilitator. The three villages studied have rulers (raja) selected based on direct lineage, despite instances of succession occurring outside the direct lineage. The involved parties seek to maintain their positive face, demonstrating that face needs influence their actions in defending their positions. This study recommends strengthening the role of local government in conflict resolution, reassessing regional regulations, and expanding research on this topic.

Keywords: Conflict management, Customary disputes, Face negotiation theory, Local government, Mata rumah parentah.

**MANAJEMEN KONFLIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
SENGKETA MATA RUMAH PARENTAH ANTARA
MATA RUMAH DAN BUPATI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Lie, Tamisha Zarika

Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang

ABSTRAK

Pemilihan mata rumah parentah seringkali menimbulkan konflik di masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa mata rumah parentah antara mata rumah dan bupati di tiga negeri, yaitu Negeri Layeni, Negeri Tulehu, dan Negeri Titawaai. Penelitian ini menggunakan dua konsep yaitu mata rumah parentah dan manajemen konflik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori negosiasi wajah untuk menganalisis bagaimana para pihak yang terlibat berusaha mempertahankan wajah mereka selama konflik. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan penyajian data deskriptif. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, seperti putusan Mahkamah Agung dan peraturan daerah serta wawancara semi terstruktur dengan pihak terkait seperti Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah, raja, dan sekretaris negeri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian konflik pemerintah daerah menggunakan gaya berkompetisi dan menghindar. Kasus-kasus adat dikembalikan kepada negeri sehingga pemerintah daerah hanya berperan sebagai mediator dan fasilitator. Ketiga negeri yang diteliti memiliki raja yang berdasarkan garis lurus keturunan meski sempat terjadi pergantian di luar garis lurus. Para pihak terkait dalam proses manajemen konflik berusaha mempertahankan wajah positif mereka, sehingga menunjukkan bahwa bahwa kebutuhan akan wajah/face needs memengaruhi tindakan para pihak dalam mempertahankan posisi mereka. Saran dari penelitian ini adalah peningkatan peran pemerintah daerah dalam proses penyelesaian konflik, pengkajian ulang terhadap peraturan daerah, dan pengembangan topik yang lebih luas.

Kata kunci: Manajemen konflik, mata rumah parentah, pemerintah daerah, *face negotiation theory*, sengketa adat.